

KERTAS KERJA 1

DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Petunjuk Pengisian:

- Isi kolom yang berwarna merah muda (Kolom Nilai Pemenuhan atau Kolom Sampel Surat Tugas [ST 1 dan 2]), sesuai nilai yang ada pada Kolom Kriteria Penilaian
- Kertas Kerja yang harus diisi hanya Kertas Kerja 1, nilai dari Kertas Kerja 1 akan secara otomatis diakumulasikan ke Kertas Kerja 2 dan Kertas Kerja 3

STANDAR	PERTANYAAN	BOBO T	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	ST 1	ST 2	KETERANGAN
STANDAR ATRIBUT								
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)								
	1. Apakah terdapat Piagam Audit yang telah disetujui oleh pimpinan K/L/D?	40	Cek apakah terdapat Piagam Audit yang telah ditandatangani oleh Pimpinan K/L/D.	-Nilai 40 jika Piagam Audit telah disetujui oleh Pimpinan K/L/D. -Nilai 20 jika Piagam Audit telah disusun namun belum disetujui oleh Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika Piagam Audit belum disusun.	40			IAC disahkan oleh Bupati Kebumen pada tanggal 4 Februari 2020 diajukan dengan Nota Dinas tanggal 3 September 2021 SPT No. 094/1092 tanggal 1 September 2021 dan Nota Dinas tanggal 5 Nopember 2021 IAC belum disahkan dalam proses.
	2. Apakah Piagam Audit telah menyatakan: a. Visi dan misi b. Tujuan c. Kewenangan d. Tanggung jawab e. Prinsip dasar pengawasan intern f. Definisi pengawasan intern g. Standar h. Kode etik i. Sifat jasa asurans dan konsultasi	45	Cek apakah Piagam Audit telah berisi unsur-unsur tersebut.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-i) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	30			-IAC disahkan oleh Bupati Kebumen pada tanggal 4 Februari 2020 diajukan dengan Nota Dinas tanggal 3 September 2021 SPT No. 094/1092 tanggal 1 September 2021 dan Nota Dinas tanggal 5 Nopember 2021 IAC belum disahkan dalam proses.

					<p>Belum melakukan penyesuaian terhadap Piagam Audit sesuai dengan peraturan dengan memuat 9 unsur secara lengkap yaitu pada unsur tujuan belum mencantumkan kaitannya dengan kapabilitas APIP dan indikatornya, belum mencantumkan unsur yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kebumen, namun demikian dalam IAC telah memuat capaian , tujuan dan sasaran yaitu a. Meningkatnya ketaatan, keekonomisan, efisiensi, efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Kebumen. b. Meningkatnya efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Kebumen. c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah</p>
					<p>Pada definisi pengawasan intern belum ada definisinya (yang ada adalah audit intern).</p>
					<p>Kaitannya dengan tanggungjawab IAC belum mencantumkan reuiu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupten Kebumen, namun dalam IAC hanya mencantumkan reuiu atas LKPD dan reuiu atas LKJIP serta evaluasi SAKIP OPD.</p>

					<p>1. Dalam point 7 tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan belum mencantumkan kegiatan pengawasan yang meliputi 1. Kinerja rutin pengawasan yang terdiri dari reviu RPJMD, RKPD, RKA Perangkat Daerah, reviu penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa, dana desa, pemeriksaan kinerja perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kas opname, reviu DAK fisik, evaluasi SPIP, evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, monitoring dan TL BPK, tindaklanjut hasil pengawasan APIP.</p>
					<p>2. Untuk Pengawasan prioritas Nasional belum mencantumkan yang meliputi pemeriksaan dana desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran reponsip Gender, operasional sapu bersih Pungli, TL kerja sama APIP APH dan pengaduan masyarakat berindikasi korupsi.</p>
					<p>3. Belum mencantumkan pengawalan reformasi birokrasi yang meliputi penilaian mandiri Reformasi birokrasi, penangan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan desa serta evaluasi pelayanan publik.</p>

					4. Belum mencantumkan penegakan integritas yang meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi, verifikasi LHKPN LHKASN penilaian zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penilaian integritas dan penanganan whistle blower system.
					3. Pada huruf H Kode etik dalam IAC belum mencantumkan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi AAIP yang berlaku, selain itu APIP dalam melaksanakan tugas belum mencantumkan kode etik dilingkungan inspektorat yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP (Inspektur) Kabupaten Kebumen.

					<p>4.Kaitannya dengan hubungan kerjasama dan koordinasi dalam IAC belum menjelaskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1.Menanyaampaikan rencana pengawasan/audit kepada audity setiap awal pemeriksaan;2. Belum mencantumkan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruksif antara APIP dan audity termasuk didalamnya memnita tanggapan hasil temuan3. Belum mencantumkan peran inspektorat dalam kegiatan asistensi, quality insuren dan coonsulting patner.4. Belum mencantumkan pendampingan kepada audity pada saat pelaksanaan oleh Pengawas Eksternal.</p>
					<p>5. Belum memncantumkan tentang tugas monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindaklanjut pelaksanaan tugas audity dan disiplin PNS dilingkungan Kabupaten Kebumen.</p>
					<p>6. Belum mencantumkan penetapan status proses penyelenggaraan tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat .</p>
					<p>7. Belum mencantumkan koordinasi pelaporan baik pelaporan periodik maupun pelaporan hasil pemeriksaanoleh BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral dan BPKP.</p>

					Dalam hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Daerah lain belum dijelaskan/belum dicantumkan pelaksanaan tugas-tugas antara lain: melakukan kerja sama berupa telaah sejawat APIP, melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam forum bersama APIP se Provinsi Jawa tengah.
					Dalam melakukan kegiatan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi, seminar, lokakarya work shopp dll.
					Dalam melakukan kerjasama dengan Aparat Intenal Pemerintah dalam IAC belum mencantumkan kerjasama dengan 1. Inspektorat Kabupaten Kebumen dengan Inpsktoat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2. Belum mencantumkan hubungan kerja dengan inspektorat lainnya; kementerian dalam negeri, kemenpan RB dan BPKP
3. Apakah Piagam Audit telah direviu secara berkala dan/atau direvisi apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP?	15	Cek apakah terdapat bukti (notula/nota dinas/surat/laporan) pelaksanaan reviu Piagam Audit secara berkala. Apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D oleh Pimpinan APIP atau perubahan lainnya, cek apakah Piagam Audit telah direvisi.	-Nilai 15 jika Piagam Audit telah direviu secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. -Nilai 0 jika Piagam Audit tidak direviu secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan pada organisasi K/L/D. -NA jika belum dapat diterapkan pada APIP. Keterangan: Perubahan Piagam Audit dapat dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan kondisi pada K/L/D. Pelaksanaan reviu biasanya dilakukan pada saat rapat pimpinan.	15	Telah direviu berdasar SPT No.094/1092 tanggal 1 Oktober 2021 dengan Nota Dinas No. 700/138 tanggal 5 Nopember 2021 .
NILAI RATA-RATA				85%	

Independensi dan Objektivitas						
Independensi APIP (Organisational Independence)	4. Apakah posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi?	20	Cek apakah posisi APIP pada struktur organisasi K/L/D telah berada (langsung) di bawah Pimpinan K/L/D. Apabila posisi APIP tidak berada secara langsung dibawah Pimpinan K/L/D, Cek apakah terdapat peraturan mengenai posisi APIP dan tanggungjawab langsung kepada Pimpinan K/L/D. Kemudian lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apakah secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D.	-Nilai 20 jika posisi APIP tepat berada secara langsung di bawah Pimpinan K/L/D atau tidak berada secara langsung di bawah pimpinan namun secara fungsional APIP bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika posisi APIP tidak tepat berada di bawah Pimpinan K/L/D dan tidak secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan.	20	Berdasarkan Perbup No 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat , kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu,
	5. Apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan (auditi) dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan?	20	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait mengenai apakah kegiatan audit intern terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. Permintaan keterangan yang perlu diyakinkan, misalnya: 1. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi meminta kepada APIP untuk tidak dilakukan audit atas kantor/unit tertentu atau membatasi ruang lingkup audit?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 2. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi untuk tidak melakukan langkah kerja tertentu dalam PKA?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut? 3. apakah pernah terjadi pimpinan/pihak auditi mempengaruhi hasil pengawasan dengan meminta pengurangan temuan tanpa alasan yang sah?bagaimana tanggapan APIP atas hal tersebut?	-Nilai 20 jika kegiatan audit intern sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan. -Nilai 10 jika kegiatan audit intern tidak sepenuhnya terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (minimal 1 kejadian terdapat campur tangan). -Nilai 0 jika kegiatan audit intern tidak terbebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil pengawasan (lebih dari 1 kejadian terdapat campur tangan).	20	

<p>Interaksi Langsung dengan Pimpinan APIP</p>	<p>6. Apakah Pimpinan APIP berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D?</p>	<p>10</p>	<p>Cek apakah terdapat mekanisme pelaporan langsung kepada Pimpinan K/L/D yang dibuktikan dengan adanya nota dinas/surat/laporan yang disampaikan kepada Pimpinan K/L/D atau undangan/notula hasil rapat pimpinan/bukti keikutsertaan pimpinan APIP pada rapat-rapat dengan Pimpinan K/L/D.</p>	<p>-Nilai 10 jika Pimpinan APIP dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan K/L/D.</p>	<p>10</p>	<p>Kegiatan : 1. Rapat evaluasi SAKIP Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 undangan No. 605/219 telah terdapat mekanisme pelaporan langsung kepada pimpinan sebagai bukti adanya nota dinas /surat/laporan yang disampaikan 2. Rapat koordinasi tindak pidana korupsi terintegrasi melalui aplikasi zoom yang bertempat di kantor provinsi Jawa Tengah, terdapat mekanisme pelaporan langsung pada pimpinan sebagai bukti adanya haftar hadir, nota dinas, undangan No. 005/1477 tanggal 3. Laporan menghadiri rapat koordinasi AAIP wilayah Jawa Tengah dibuktikan melalui mekanisme pelaporan dengan bukti undangan No. 005/2449/1.2/2021 SPT. No. 094/2066 tanggal 25 Oktober 2021</p>
---	---	-----------	---	---	-----------	---

<p>Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern</p>	<p>7. Apabila Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern, apakah terdapat mekanisme pengaman yang memadai untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas?</p>	<p>10</p>	<p>Cek dokumen dan lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab pada area di luar kegiatan pengawasan intern. Jika ada, lakukan wawancara kepada pejabat untuk meyakinkan apakah terdapat alternatif lain pada proses pelaksanaan asurans di area tersebut dan cek Piagam Audit apakah terdapat pengungkapan peran dan proses pengamanannya. contoh pengamananan: mengikutsertakan APIP lain (misal: BPKP) untuk pelaksanaan asurans pada area tersebut.</p>	<p>-Nilai 10 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit dan terdapat proses pengamananan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai 5 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya telah diungkapkan dalam Piagam Audit atau terdapat proses pengamananan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai 0 Jika peran di luar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya tidak diungkapkan dalam Piagam Audit dan tidak terdapat proses pengamananan untuk pelaksanaan asurans area tersebut. -Nilai NA jika pimpinan APIP tidak memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern.</p>	<p>5</p>	<p>Terdapat Keputusan Bupati : 1.Nomor 840/124 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 2.Nomor 060/133 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 3.Nomor 028/2004 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 4.Nomor 900/2005 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun</p>
--	---	-----------	---	---	----------	--

Objektivitas Auditor (Individual Objectivity)	8. Apakah Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya?	10	Bandingkan daftar hubungan keluarga/kekerabatan/ yang berkepentingan antara auditor dan pihak auditan dengan surat tugas yang diujipetik, apakah terdapat penugasan yang menimbulkan konflik kepentingan. Bandingkan riwayat pekerjaan auditor dan surat tugas untuk meyakinkan bahwa Auditor mendapat penugasan asurans yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya? (dapat berupa hubungan keluarga/pekerjaan yang ditangani sebelumnya/kegiatan konsultasi yang diberikan sebelumnya). Lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan bahwa Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya.	-Nilai 10 jika tidak terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. -Nilai 0 jika terdapat bukti adanya penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.	10		1. Terdapat Daftar Kekerabatan APIP Tahun 2021, terdapat pernyataan setiap penugasan independansi dan obyektifitas pemeriksa, terdapat pedoman Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Perbub No.104 Tahun 2020 tanggal....., terdapat SOP Benturan Kepentingan dalam SK Nomor 700/19/Kep.2021 2. Belum dilengkapi Pakta Integritas disetiap Pegawai Tahun 2020 dan 2021 Terdapat dokumen daftar kekerabatan pegawai Inspektorat
Kendala terhadap Independensi atau Objektivitas	9. Apakah terdapat kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	20	Cek apakah terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor?	-Nilai 20 jika terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor. -Nilai 0 jika tidak terdapat peraturan terkait kebijakan dan mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor.	20		1. Belum dibentuk Tim Pengungkapan adanya kendala terhadap Independensi/obyektifitas auditor. 2. Keputusan Inspektur No. 700/19/KEP/2021 Tahun 2021 tentang SOP Benturan Kepentingan Inspektorat Kabupaten Kebumen TA. 2021
	10. Apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan?	10	Lakukan analisis atas dokumen hubungan kekeluargaan/kekerabatan/ yang berkepentingan antara auditor dengan pihak auditan atau riwayat pekerjaan auditor atau dokumen yang relevan untuk meyakinkan apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan. Lakukan wawancara jika diperlukan kepada inspektur/pejabat terkait.	-Nilai 10 jika terdapat konflik kepentingan dan auditor melaporkan atau jika tidak terdapat bukti adanya konflik kepentingan. -Nilai 0 jika terdapat konflik kepentingan namun auditor tidak melaporkan.	10		Sejak Tim Pengungkapan Independensi/Obyektifitas dibentuk pada Des 2019 sd. Sekarang belum menangani Terdapat dokumen daftar kekerabatan pegawai Inspektorat
NILAI RATA-RATA						95%	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional							

Kompetensi Auditor	11. Apakah Pimpinan APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial)?	10	Cek apakah terdapat aturan/ketentuan terkait standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial).	-Nilai 10 jika APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (Teknis dan Manajerial). -Nilai 5 jika APIP hanya menetapkan salah satu standar kompetensi auditor. -Nilai 0 jika APIP belum menetapkan standar kompetensi auditor. Keterangan: Mengingat standar kompetensi auditor mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, maka untuk pertanyaan ini mendapat nilai maksimal.	10	peraturan Inspektur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar kompetensi Auditor.
	12. Apakah pimpinan APIP telah mendorong dan menjaga agar setiap auditor memenuhi standar kompetensi auditor yang telah ditetapkan?	20	Cek apakah terdapat hasil assessment dan rencana pelatihannya untuk meyakinkan apakah penilaian atas kompetensi auditor telah dilakukan dan terdapat rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan?	- Nilai 20 jika terdapat penilaian kompetensi auditor dan rencana pemenuhan gap kompetensi auditor melalui pola pelatihan. - Nilai 10 jika terdapat penilaian kompetensi auditor namun belum memiliki pola pelatihan atau telah menyelenggarakan pelatihan namun bukan berdasarkan gap kompetensi (competency based training). - Nilai 0 jika tidak terdapat keduanya.	10	Telah disusun Pedoman pengembangan profesi individu APIP
	13. Apakah seluruh personil dalam tim audit telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya?	20	Bandingkan surat tugas dengan daftar auditor yang telah bersertifikasi dan/atau daftar auditor yang pernah mengikuti diklat JFA untuk meyakinkan bahwa pemberian peran dalam tim telah sesuai dengan jabatan sertifikasi/diklat JFA yang pernah diikuti. Lakukan permintaan keterangan dengan petugas/auditor terkait jika diperlukan.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	20	1. Terdapat Daftar Auditor dengan Nomor Sertifikasi 2. terdapat sample surat tugas
	14. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (fraud) dan mitigasinya?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait fraud untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (fraud) dan mitigasinya.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	10	sudah dilengkapi dengan bukti dukung sertifikat diklat yang pernah mengikuti diklat investigatif, probity dan forensik

15. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI)?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI).	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	10		sudah dilengkapi dengan bukti dukung sertifikat diklat yang pernah mengikuti diklat ianalisis manajemen risiko dan SPIP terintegratif
16. Apakah auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK)?	10	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang pernah diikuti oleh auditor terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK) untuk meyakinkan bahwa seluruh auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknik audit berbantuan komputer (TABK).	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	0		Terdapat : 1. PKS siskeudes
17. Dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, apakah auditor telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli?	10	Cek daftar surat tugas yang bersifat asurans untuk memastikan bahwa auditor telah memperoleh saran dan asistensi dari tenaga ahli jika penugasan tersebut membutuhkan saran dari tenaga ahli. Lakukan permintaan keterangan apakah tim audit telah memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli.	-Nilai 10 jika tim audit telah memperoleh saran dan/atau asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. -Nilai 0 jika tim audit membutuhkan namun tidak memperoleh saran dan asistensi yang kompeten dari tenaga ahli. - NA jika tidak terdapat penugasan yang membutuhkan tenaga ahli.	10		sudah ada surat permohonan tenaga ahli dan legal opiniom dari tenaga ahli
18. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, apakah auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan?	5	Cek dan analisis dokumen hasil penilaian profesional yang dilakukan auditor untuk meyakinkan apakah penilaian yang dibuat auditor telah mempertimbangkan kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan.	-Nilai 5 jika auditor telah menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. -Nilai 0 jika auditor tidak menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. -NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.	5		terdapat surat izin dari UGM sebagai ahli hukum administrasi negara
19. Apakah penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor?	5	Analisis catatan/bukti/kertas kerja hasil supervisi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan profesional untuk meyakinkan apakah supervisi yang dilakukan telah memadai sebagaimana supervisi terhadap auditor.	-Nilai 5 jika penggunaan tenaga ahli telah disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. -Nilai 0 jika penggunaan tenaga ahli tidak disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. -NA jika tidak menggunakan tenaga ahli.	5		sudah ada analisa kasus beserta kajian dari tenaga ahli yang dijadikan pedoman pengambilan keputusan

Kecermatan Profesional Auditor	<p>20. Apakah auditor telah menunjukkan kecermatan profesional (khusus untuk penugasan asurans) antara lain dalam:</p> <p>a. formulasi tujuan penugasan audit intern;</p> <p>b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern;</p> <p>c. pemilihan pengujian dan hasilnya;</p> <p>d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern;</p> <p>e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya;</p> <p>f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern;</p> <p>g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit intern.</p>	<p>80</p>	<p>Lakukan penilaian terhadap kecermatan profesional:</p> <p>a. formulasi tujuan penugasan audit intern;</p> <p>b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern;</p> <p>c. pemilihan pengujian dan hasilnya.</p> <p>d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern;</p> <p>e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya;</p> <p>f. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern;</p> <p>g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (misal, penggunaan tenaga ahli atau hasil konfirmasi dari pihak lain) yang berkaitan dengan penugasan audit intern.</p>	<p>-Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah unsur (a-g) yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.</p> <p>-Nilai NA jika bukan penugasan asurans.</p>	<p>68</p>	<p>68</p>	<p>68</p>	<p>auditor telah menunjukkan kecermatan profesional, namun ruang lingkup di PKP belum tetapi adanya di Laporan, serta Sumber daya di PKPT tidak disebutkan secara lengkap adanya di surat tugas</p>
	<p>21. Dalam menerapkan kecermatan profesional, apabila diperlukan (khusus untuk penugasan asurans), apakah auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya?</p>	<p>10</p>	<p>Cek dan analisis dalam uraian kertas kerja apakah auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya untuk menghasilkan simpulan atas langkah kerja yang telah dilaksanakan.</p>	<p>-Nilai 10 jika dalam hal diperlukan, auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya.</p> <p>-Nilai 0 jika dalam hal diperlukan, auditor tidak menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya.</p> <p>-NA jika tidak memerlukan penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan teknik analisis data lainnya.</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>Auditor telah menggunakan teknik audit berbantuan komputer dan teknik analisis lainnya yaitu dengan menggunakan aplikasi excel</p>

	22. Dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial?	10	Lakukan permintaan keterangan dengan tim, dalam penugasan konsultasi, apakah auditor telah mempertimbangkan: a. kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan; b. kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan c. biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial.	-NA dikarenakan kedua sampel merupakan penugasan asurans.	NA		
Pengembangan Profesional Berkelanjutan	23. Apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya?	100	Cek daftar pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang memiliki substansi di bidang pengawasan yang diikuti oleh masing-masing auditor untuk meyakinkan apakah seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai.	Nilai diperoleh dari perbandingan antara jumlah auditor yang telah memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor dikalikan dengan bobot.	100		Pada tahun 2021 seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (<i>continuing professional education</i>) yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya.
NILAI RATA-RATA					89%		
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas							
	24. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas?	10	Cek apakah terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.	Nilai 10 jika terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP. Nilai 0 jika belum terdapat pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas di lingkungan internal APIP.	10		Pimpinan APIP telah menetapkan pedoman terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas, yaitu Peraturan Inspektur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman revid Internal antar Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat kabupaten Kebumen

25. Apakah APIP telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern?	30	Lakukan perhitungan pemantauan berkelanjutan pada setiap penugasan pengawasan intern dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan dan pemantauan tindak lanjut.	<p>Keterangan: Nilai Pemenuhan telah diberikan rumus</p> <p>Nilai diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan hasil penilaian atas 4 sub standar dibandingkan dengan total maksimal (100) dikalikan dengan bobot. 4 sub komponen/unsur, yaitu (sekaligus contoh simulasi):</p> <p>1. nilai rata-rata Perencanaan Penugasan (25%)= 25% x 100 = 25 2. nilai rata-rata Pelaksanaan Penugasan (25%) = 25% x 100 = 25 3. nilai rata-rata Komunikasi Hasil Penugasan (25%) = 25% x 50 = 12.5 4. nilai rata-rata Pemantauan Tindak Lanjut (25%) = 25% x 50 = 12.5 Jumlah = 25+25+12.5+12.5= 75/100 x 30 = 22,5</p>	24		
26. Apakah APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek laporan hasil penilaian intern (telaah sejawat internal) dan peraturan terkait untuk meyakinkan apakah penilaian intern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	<p>-Nilai 25 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern. -Nilai 15 jika APIP telah melakukan penilaian intern secara berkala terhadap sebagian aspek kegiatan audit intern. -Nilai 0 jika APIP belum melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.</p>	15		Belum seluruh aspek dilakukan penilaian yaitu : 2. penentuan ruang lingkup (evaluasi risiko); 5. penentuan signifikansi risiko teridentifikasi; 7. penentuan kompetensi, integritas dan simpulan pihak lain dalam audit intern (outsourcing)
27. Apakah terhadap APIP telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern?	25	Cek dan analisis laporan hasil penilaian ekstern (telaah sejawat dengan kementerian lain) untuk meyakinkan apakah penilaian ekstern telah dilakukan secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.	<p>-Nilai 25 jika telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP. -Nilai 0 jika belum dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan audit intern terhadap APIP.</p>	25		Telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern pada tahun 2018 berupa kegiatan Telaah Sejawat Ekstern
28. Apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hasil dari pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Pimpinan K/L/D setiap tahun?	10	Cek apakah hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya.	<p>-Nilai 10 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika hasil pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas belum diinformasikan dalam LAKIN/laporan lainnya kepada Pimpinan K/L/D.</p>	10		Pimpinan APIP sudah mengkomunikasikan hasil dari pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Pimpinan K/L/D setiap tahun
NILAI RATA-RATA				84%		
NILAI RATA-RATA STANDAR ATRIBUT				88%		

STANDAR PELAKSANAAN

Mengelola Kegiatan Audit Intern

STANDAR PELAKSANAAN						
Mengelola Kegiatan Audit Intern						
Perencanaan	29. Apakah APIP telah memiliki Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis organisasi?	10	Analisis Renstra APIP dan Renstra K/L/D apakah telah selaras?	-Nilai 10 jika Renstra APIP telah selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 6 jika Renstra APIP sebagian besar telah selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 3 Jika Renstra APIP sebagian besar tidak selaras dengan Renstra K/L/D. -Nilai 0 jika Renstra APIP tidak selaras dengan Renstra K/L/D.	10	Renstra 2021-2026 sudah selaras dengan RPJMD 2021 - 2026
	30. Apakah APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	10	Cek PKPT dan dokumen pendukungnya untuk meyakinkan apakah perencanaan pengawasan yang disusun telah berbasis risiko dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi?	-Nilai 10 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) berdasarkan faktor risiko (baik risiko internal maupun eksternal) atau dokumen risiko (risk register) yang dimiliki auditi atau kombinasi keduanya sesuai dengan tujuan organisasi. -Nilai 5 jika APIP telah menyusun perencanaan berbasis risiko (risk-based plan) namun belum sesuai dengan tujuan organisasi dan sebaliknya. - Nilai 0 jika APIP belum menyusun perencanaan berbasis risiko dan belum sesuai dengan tujuan organisasi.	10	Terdapat dokumen : 1. Audit Universe 2. PPBR untuk OPD adalah data anggaran, resiko auditan, efektifitas pengendalian) 3. PKPT Berbasis Risiko 2021 Keputusan Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/504 Tahun 2020 4. SK Inspektur Nomor 700/15/KEP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Kebumen nomor 700/2/KEP/2019 tentang Pedoman perencanaan pengawasan berbasis resiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen.
	31. Apakah Pimpinan APIP telah berdiskusi/berkomunikasi kepada auditi dan pimpinan K/L/D untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko?	10	Cek notula/nota dinas/dokumen lainnya untuk meyakinkan apakah pimpinan APIP telah berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D mengenai strategi organisasi, tujuan bisnis utama, risiko-risiko terkait, dan proses pengelolaan risiko dalam rangka menyusun perencanaan?	-Nilai 10 jika pimpinan APIP telah berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D. -Nilai 5 Jika pimpinan APIP hanya berdiskusi dengan auditi atau pimpinan K/L/D. -Nilai 0 Jika pimpinan APIP belum berdiskusi dengan auditi dan pimpinan K/L/D.	10	1. Telah melakukan MO dengan Wakil Bupati atas Evaluasi Kinerja APIP pada 15 Mei 2020, 2. Telah dilakukan LARWASDA dan penganangan ZI pada 28 September 2021

Komunikasi dan Persetujuan	32. Apakah Pimpinan APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern dan kebutuhan sumber daya (PKPT) kepada auditi dan pimpinan K/L/D, dan pimpinan K/L/D telah menyetujuinya?	10	1. Cek notula hasil rapat/laporan/nota dinas/surat/dokumentasi lainnya untuk meyakinkan apakah rencana kegiatan pengawasan intern telah dikomunikasikan kepada auditi dan pimpinan K/L/D? 2. Cek PKPT maksimal 1 tahun sebelumnya untuk meyakinkan apakah PKPT telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/D?	-Nilai 10 jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi dan pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 6 Jika APIP belum mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi namun rencana kegiatan pengawasan telah disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 3 Jika APIP telah mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi namun rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D. -Nilai 0 Jika APIP tidak mengkomunikasikan rencana kegiatan pengawasan intern kepada auditi dan pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta rencana kegiatan pengawasan tidak disetujui oleh pimpinan K/L/D.	10	PKPT 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Kebumen PKPT sudah dikomunikasikan kepada Kada dan semua Kepala OPD Surat Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 005/87 tanggal 10 Februari 2021 perihal Undangan terkait Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Kebumen dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2022
	33. Dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, apakah Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D?	5	Lakukan permintaan keterangan dengan pejabat terkait untuk memastikan bahwa pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dampak dalam hal terdapat pembatasan sumber daya (pendanaan, SDM, dll) kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	-Nilai 5 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika dalam hal terdapat pembatasan sumber daya, Pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dampaknya kepada pimpinan K/L/D. -NA jika pembatasan sumber daya tidak memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan audit intern.	5	Surat Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 053.7/188 tanggal 28 April 2020 perihal Usulan kebutuhan ASN Tahun 2020 Surat Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 130.2/291.1 tanggal 25 Juni 2020 perihal Data usulan anggaran perubahan Tahun 2020
Pengelolaan Sumber Daya	34. Apakah terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT?	10	Verifikasi PKPT untuk memastikan apakah perencanaan sumber daya manusia dan keuangan dicantumkan dalam PKPT.	-Nilai 10 jika terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT. -Nilai 5 jika perencanaan sumber daya manusia dan keuangan tidak dituangkan dalam bentuk PKPT atau hanya terdapat perencanaan sumber daya manusia/keuangan saja dalam PKPT. -Nilai 0 jika belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan yang tercantum dalam PKPT.	5	Pada dokumen PKPT Tahun 2021 sudah ada No;Obrik;Sasaran audit;ruang lingkup audit; RMP;RPL;HP; Irban; Sarpas namun belum mencantumkan Susunan Tim/nama, karena dalam PKPT hanya mencantumkan jumlah personil

<p>Kebijakan dan Prosedur</p>	<p>35. Apakah pimpinan APIP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengarahkan/memandu kegiatan pengawasan intern dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor?</p>	<p>20</p>	<p>1. Cek apakah terdapat aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern yang berlaku di lingkungan APIP yang ditelaah. 2. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara elektronik, cek website atau aplikasi publikasi untuk memastikan bahwa aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut telah dipublikasi. Dalam hal aturan/prosedur/pedoman terkait audit intern tersebut dikomunikasikan secara tatap muka, cek daftar hadir dan undangan sosialisasi/PKS untuk meyakinkan seluruh auditor telah dikomunikasikan. 3. Lakukan permintaan keterangan dengan auditor secara sampling untuk memastikan apakah auditor telah memahami pedoman yang dimaksud.</p>	<p>-Nilai 20 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 15 jika terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 10 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 5 jika hanya terdapat sebagian kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan sebagian dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor. -Nilai 0 jika belum terdapat kebijakan dan prosedur atau pedoman audit intern yang memadai dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor.</p>	<p>20</p>		<p>Terdapat : 1. Peraturan Inspektur Kebumen No 3 Tahun 2018 tentang pedoman kendali mutu pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah pada inspektorat kabupaten kebumen 2. Peraturan Inspektur Kebumen No 1 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen 3. Peraturan Inspektur Kebumen No. 4 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten kebumen 4. Peraturan Inspektur Kebumen No. 1 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur (SOP) pengawasasn dana desa dan pengawasan atas</p>
<p>Koordinasi dan Penyandaran</p>	<p>36. Apakah Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan?</p>	<p>5</p>	<p>Cek notula hasil rapat/koordinasi terkait rencana kegiatan audit intern tahunan dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan.</p>	<p>-Nilai 5 jika Pimpinan APIP telah berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. -Nilai 0 jika Pimpinan APIP tidak berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. -NA jika pimpinan APIP tidak memungkinkan berkoordinasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.</p>	<p>5</p>		<p>Terdapat dokumen hasil pembahasan peta pengawasan 2021 dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2919/1.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Undangan dan pelaksanaan Renwas tanggal 22 Oktober 2020</p>

Laporan kepada Pimpinan Auditi dan Pimpinan K/L/D	37. Apakah pimpinan APIP telah melaporkan secara periodik kepada pimpinan Auditi dan pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar dalam Laporan Kinerjanya setiap tahun?	10	Cek dan analisis apakah laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar?	-Nilai 10 jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya dan kesesuaian dengan kode etik dan standar. -Nilai 6 Jika laporan kinerja/laporan lainnya telah menginformasikan 2 dari 3 unsur. -Nilai 3 jika laporan kinerja/laporan lainnya hanya menginformasikan 1 unsur (misal realisasi kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya). -Nilai 0 jika laporan kinerja/laporan lainnya tidak menginformasikan seluruhnya.	10	LKJIP belum memuat wewenang, tanggung jawab	
	38. Apakah APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat?	5	Cek apakah terdapat aturan/SOP terkait mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.	-Nilai 5 jika APIP memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. -Nilai 0 jika APIP belum memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat.	5		Terdapat SOP Pengawasan Atas Pengaduan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020
	39. Apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan?	5	Analisis dokumen pengaduan masyarakat dan dokumen penanganannya oleh APIP untuk meyakinkan apakah penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.	-Nilai 5 jika penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. -Nilai 0 penanganan pengaduan masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.	5		Terdapat dokumen aduan atas kasus Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo dan aduan kasus Desa Sitibentar yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
NILAI RATA-RATA					95%		
Sifat Dasar Pekerjaan							

Tata Kelola Sektor Publik	40. a. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro? Audit ini mencakup seluruh kerangka tata kelola yang meliputi etika, perencanaan, monitoring dan pelaporan. b. Apakah APIP telah melakukan audit tata kelola di level mikro? Audit ini dilakukan hanya pada suatu risiko tertentu, proses-proses tertentu seperti monitoring atau pelaporan, atau pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mempromosikan etika organisasi.	20	Cek Laporan Hasil Audit Tata Kelola di level makro dan mikro untuk meyakinkan bahwa audit tata kelola di level makro dan mikro sudah dilakukan oleh APIP. Lakukan permintaan keterangan kepada pejabat terkait untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro dan mikro.	-Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a dan b. -Nilai 10 jika APIP telah memenuhi poin a dan b namun belum mencakup seluruh kerangka tata kelola. -Nilai 5 jika APIP hanya memenuhi salah satu poin a atau b. -Nilai 0 jika APIP tidak memenuhi poin a dan b.	20	Telah melakukan : a. Audit tata kelola makro : -revisi RPJMD 2021-2026 -pelaporan : revisi LKPD 2020 -etika : audit kepatuhan PBJ TA 2020 -perencanaan : revisi RKPD 2020 -monitoring : pelaksanaan bantuan keuangan khusus TA 2021 Desa Banjararjo Kec. Ayah b. Audit tata kelola Mikro : Audit Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM TA 2021; Audit Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2020
	41. Apakah APIP telah melakukan audit untuk mengevaluasi rancangan, penerapan, dan efektivitas tujuan, program, dan kegiatan terkait etika organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit terkait etika organisasi.	-Nilai 10 jika APIP telah melakukan audit etika organisasi. -Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit etika organisasi.	0	Terdapat dokumen LHP Kasus Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan pada Guru SD N 1 Jatijajar Nomor 700/Adhoc/01/RHS/2021 tanggal 13 Agustus 2021
	42. Apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai apakah tata kelola TI organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi?	10	Cek apakah terdapat laporan hasil audit tata kelola TI.	-Nilai 10 Jika APIP telah melakukan audit tata kelola TI organisasi. -Nilai 0 Jika APIP belum melakukan audit tata kelola TI atau belum bisa diterapkan karena tidak ada proses bisnis di organisasi yang menggunakan aplikasi/berbasis teknologi.	10	Telah melakukan audit IT PBJ TA 2020 pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Nomor 700/IP.IV/23/2020 tanggal 30 Desember 2020 Namun, belum ada laporan tindak lanjut hasil audit IT PBJ dari Bagian PBJ Setda

Pengelolaan Risiko	<p>43. a. Untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi?</p> <p>b. Untuk organisasi yang belum menerapkan sistem manajemen risiko, apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko?</p>	20	<p>Cek dan analisis laporan hasil audit atas manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan audit atas manajemen risiko untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko. Cek dan analisis laporan/surat/nota dinas hasil kegiatan terkait pengembangan sistem manajemen risiko di organisasi K/L atau Pemda untuk meyakinkan apakah APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko di lingkungan K/L atau Pemda tersebut. Lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan APIP sesuai dengan kondisi organisasi dalam menerapkan sistem manajemen risiko.</p>	<p>-Nilai 20 jika APIP telah memenuhi poin a. -Nilai 15 jika APIP telah memenuhi poin b. -Nilai 10 jika organisasi telah cukup matang menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi. -Nilai 5 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum sepenuhnya memberikan dukungan secara berkelanjutan/terus menerus dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko. -Nilai 0 jika organisasi belum menerapkan sistem manajemen risiko, namun APIP belum memberikan dukungan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko.</p>	5		<p>Belum menilai efektivitas MR. Namun sudah melakukan evaluasi daftar penilaian risiko dan pendampingan penyusunan RTP yang dilengkapi dengan SPT s.d laporan dan TL</p>
Pengendalian	<p>44. Apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas?</p>	20	<p>Cek dan analisis surat tugas terkait evaluasi atas efektivitas pengendalian intern atau laporannya untuk meyakinkan apakah APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.</p>	<p>-Nilai 20 jika APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas. -Nilai 0 jika APIP belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.</p>	0		<p>Dalam PKA sudah menuangkan tentang SPI, namun dari 2 sampel yang disepakati hanya ada 1 (Disdag) yang menuangkan SPI di KKA</p>
	<p>45. Apakah auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam proses tata kelola, operasi dan sistem informasi organisasi?</p>	20	<p>Lakukan uji petik terhadap minimal 2 penugasan yang akan digunakan untuk menguji pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya. Cek dan analisis Laporan Hasil Uji Pengendalian/Laporan Survey Pendahuluan/<i>Management Letter</i> /Kertas Kerja Audit untuk meyakinkan apakah auditor telah melakukan evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.</p>	<p>-Nilai 20 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan. -Nilai 10 jika auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan namun belum melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan atau sebaliknya. -Nilai 0 auditor belum mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.</p>	20		<p>Terdapat : Penilaian efektifitas RTP dan menyusun rekomendasi perbaikan RTP sudah dilakukan dan sudah langsung ditindaklanjuti</p>

NILAI RATA-RATA				55%				
Perencanaan Penugasan								
Tujuan Penugasan	<p>46. Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern?</p> <p>Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa:</p> <p>a. Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif;</p> <p>b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern;</p> <p>c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).</p>	30	<p>Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.</p>	<p>-Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai pada penugasan audit intern.</p> <p>-Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai.</p> <p>-Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya.</p> <p>-Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya.</p> <p>-Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik pada penugasan audit intern.</p>	0	0	0	<p>ST 1 : Tujuan audit dalam PKP sudah ditetapkan secara umum dan tujuan spesifik namun belum memadai.</p> <p>ST 2 : Tujuan audit dalam PKP sudah ditetapkan secara umum dan tujuan spesifik namun belum memadai</p>
	<p>47. Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?</p>	10	<p>Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?</p>	<p>Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.</p> <p>Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.</p>	10	10	10	<p>ST 1 : tidak terdapat survey pendahuluan dan daftar risiko dalam PKP</p> <p>ST 2 : tidak terdapat survey pendahuluan dan daftar risiko dalam PK</p>
Ruang Lingkup Penugasan	<p>48. Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai (penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit) untuk mencapai tujuan?</p>	20	<p>Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.</p>	<p>-Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan.</p> <p>-Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan.</p> <p>-Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup.</p>	5	5	5	<p>ST 1 : Ruang lingkup belum ditetapkan dalam PKP namun sudah ditetapkan dalam LHA</p> <p>ST 2 : Ruang lingkup belum ditetapkan dalam PKP namun sudah ditetapkan dalam LHA</p>

Alokasi Sumber Daya Penugasan	49. Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya?	10	Cek dan verifikasi PKPT dan Surat Tugas untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.	-Nilai 10 jika auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya. -Nilai 0 jika terdapat penugasan kompleksitas tinggi namun dilaksanakan dengan tim dengan jumlah tim sedikit, kompetensi kurang, waktu terbatas.	10	10	10	ST 1 : SDM dalam PKPT tidak mencantumkan nama Tim/ personil, jadi tidak dapat dijadikan acuan dlm menentukan personil penugasan ST 2 : SDM dalam PKPT tidak mencantumkan nama Tim/ personil, jadi tidak dapat dijadikan acuan dlm menentukan personil penugasan
Program Kerja Penugasan	50. Apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu?	10	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.	-Nilai 10 jika program kerja penugasan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. - Nilai 5 jika program kerja penugasan telah disusun namun belum disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu - Nilai 0 jika program kerja penugasan tidak disusun.	10	10	10	ST 1 : PKP sudah ditandatangani Ketua Tim, PT, dan Inspektur ST 2 : PKP sudah ditandatangani Ketua Tim, PT, dan Inspektur
	51. Apakah program kerja yang disusun telah memadai (program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasi informasi selama penugasan)?	20	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	Nilai 20 jika program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Nilai 10 jika sebagian besar program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Nilai 5 jika sebagian besar program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Nilai 0 jika program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan (program kerja yang disusun sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan penugasan).	20	20	20	ST 1 : PKP sudah menetapkan tujuan secara memadai dan belum dijabarkan secara spesifik dalam langkah kerja ST 2 : KP sudah menetapkan tujuan secara memadai dan belum dijabarkan secara spesifik dalam langkah kerja
NILAI RATA-RATA					55%			
Pelaksanaan Penugasan								
Pengidentifikasian Informasi	52. Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan atau berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	-Nilai 20 jika informasi yang diidentifikasi seluruhnya telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. -Nilai 14 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. -Nilai 7 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar kurang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasantelah lengkap terpenuhi. -Nilai 0 jika tidak terdapat informasi yang diidentifikasi.	14	14	14	ST 1 : KKA berisi terkait pencapaian PKA sebagian besar telah cukup handal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan ST 2 : KKA berisi terkait pencapaian PKA sebagian besar telah cukup handal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan

Analisis dan Evaluasi	53. Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi. misalnya: cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.	-Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat -Nilai 0 jika tidak terdapat simpulan dan hasil penugasan.	14	7	20	ST 1 : KKA belum mencantumkan kesimpulan ST 2 : KKA sudah mencantumkan kesimpulan
Pendokumentasian Informasi	54. Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.	-Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yangmemadai,andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/hardcopy). -Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan. -Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan. -Nilai 0 jika simpulan dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi.	14	7	20	ST 1 : KKA yang berisi informasi auditi tidak dilengkapi dengan kesimpulan ST 2 : KKA yang berisi informasi auditi sudah dilengkapi dengan kesimpulan
	55. Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain?	20	Cek apakah terdapat aturan/prosedur terkait pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi hasil audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	-Nilai 20 jika APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. -Nilai 0 jika APIP belum memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	20	20	20	
Supervisi Penugasan	56. Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	20	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	-Nilai 20 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. -Nilai 14 jika sebagian besar telah disupervisi secara memadai. -Nilai 7 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. -Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan.	20	20	20	ST 1 : KKA sudah disupervisi oleh Ketua Tim dan Pengendali Mutu/Pengendali Teknis ST 2 : KKA sudah disupervisi oleh Ketua Tim dan Pengendali Mutu/Pengendali Teknis

NILAI RATA-RATA					81%			
Komunikasi Hasil Penugasan								
Kriteria Komunikasi	57. Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut?	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	16	16	16	Unsur e tidak terpenuhi (rencana aksi)
	58. Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	- Nilai 10 jika kinerja auditi yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. - Nilai 0 jika kinerja auditi yang memuaskan tidak dicantumkan dalam laporan hasil penugasan.	0	0	0	Telah mencantumkan kinerja positif auditi pada laporan
	59. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. - Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu.	10	20	0	ST 2 lebih dari 21 hari berdasarkan SOP - dalam Peraturan Inspektur Kab. Kebumen Nomor 3 Tahun 2021
Kualitas Komunikasi	60. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	20	20	20	LHA semua unsur lengkap
Kesalahan dan Kealpaan	61. Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?	10	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.	-Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. -Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain. -NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat.	NA			Tidak ada

Penggunaan Frasa	62. Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar" hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah sejawat internal atau eksternal dengan nilai minimal "BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar".	-Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -NA jika belum terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian.	10	10	10	TS 1 - LHR Irban II yg menelaah Irban I sudah mencantumkan pernyataan "sudah sesuai norma-norma audit, dengan Hasil penilaian Th 2020 "baik" dengan total nilai 82,20 TS 1 - LHR Irban I yg menelaah Irban IV sudah mencantumkan pernyataan "sudah sesuai norma-norma audit, dengan Hasil penilaian Th 2020 "BAIK SEKALI" dengan total nilai 92,50
Penyampaian Hasil Penugasan	63. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	-Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. -Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	10	10	10	ST 1 : dikirim 6 Oktober 2021 No.700/1930 ST 2 : dikirim tanggal 14 September 2020 No.700/2277 & 700/IP.IV/12/18/20
NILAI RATA-RATA					73%			
Pemantauan Tindak Lanjut								
	64. Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut?	20	Cek apakah terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP.	-Nilai 20 jika APIP telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut. -Nilai 0 jika APIP tidak memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut.	20			sudah ada SOP Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan No : 700/593/2020, tanggal 1 Desember 2020
	65. Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?	30	Dari 2 sampel penugasan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	- Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan auditi sesuai dengan rekomendasi atau tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu - Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan auditi padahal sudah melebihi kesepakatan waktu atau semua tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi.	25	30	20	ST 1 : Disnaker 5 Temuan 5 Rekomendasi selesai seluruhnya ST 2 : Disperindag masih terdapat 2 temuan nomor 3 dan 4 yang belum selesai TL nya dan baru diselesaikan pada tgl 10 Maret 2021 (7 bulan setelah LHP terbit)

	66. Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada auditi atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan auditi dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	-Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. -Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. -Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit.	15	15	15	ST 1 Semua temuan sudah di TL sebelum LHP Terbit ST 2 Pemantauannya dengan rakor TL dengan mengundang OPD terkait
	67. Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?	10	Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti dengan cara yang berlainan.	-Nilai 10 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -Nilai 0 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -NA jika tidak terdapat kondisi auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.	NA			Tidak ada
	68. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?	10	Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.	-Nilai 10 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. -Nilai 5 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. -Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.	10	10	10	Temuan pemeriksaan sebelumnya pada sampel telah ditindaklanjuti semua (Disnaker LHP 2018 dan Disperindag LHP 2019)
Komunikasi Penerimaan Risiko	69. Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa auditi menanggung/menerima risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikannya/membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi?	10	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat terkait apakah terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti auditi karena auditi akan menerima risikonya dan atas hal tersebut telah dibahas/dikomunikasikan dengan pimpinan auditi.	-Nilai 10 jika pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai 0 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.	NA			Tidak ada

70. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	5	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	-Nilai 5 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.	NA			Tidak ada
NILAI RATA-RATA				93%			
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN				75%			
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR				81,78%			

KERTAS KERJA 2 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI		
STANDAR ATRIBUT						
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	1	40	40			
	2	45	30			
	3	15	15			
	JUMLAH	100	85		85%	
Independensi dan Objektivitas	4	20	20			
	5	20	20			
	6	10	10			
	7	10	5			
	8	10	10			
	9	20	20			
	10	10	10			
	JUMLAH	100	95		95%	
	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	11	10		10	
		12	20		10	
13		20	20			
14		10	10			
15		10	10			
16		10	0			
17		10	10			
18		5	5			
19		5	5			
20		80	68			
21		10	10			
22		10	NA			
23		100	100			
JUMLAH		290	258	89%		
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	24	10	10			
	25	30	24			
	26	25	15			
	27	25	25			
	28	10	10			
JUMLAH	100	84	84%			
STANDAR PELAKSANAAN						
Mengelola Kegiatan Audit Intern	29	10	10			
	30	10	10			
	31	10	10			
	32	10	10			
	33	5	5			
	34	10	5			
	35	20	20			
	36	5	5			
	37	10	10			
	38	5	5			
	39	5	5			
	JUMLAH	100	95		95%	
	Sifat Dasar Pekerjaan	40	20		20	
41		10	0			
42		10	10			
43		20	5			
44		20	0			
45		20	20			
JUMLAH	100	55	55%			
Perencanaan Penugasan	46	30	0			
	47	10	10			
	48	20	5			
	49	10	10			
	50	10	10			
	51	20	20			
JUMLAH	100	55	55%			
Pelaksanaan Penugasan	52	20	14			
	53	20	14			
	54	20	14			
	55	20	20			
	56	20	20			
JUMLAH	100	81	81%			

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
Komunikasi Hasil Penugasan	57	20	16	
	58	10	0	
	59	20	10	
	60	20	20	
	61	10	NA	
	62	10	10	
	63	10	10	
	JUMLAH	90	66	
Pemantauan Tindak Lanjut	64	20	20	
	65	30	25	
	66	15	15	
	67	10	NA	
	68	10	10	
	69	10	NA	
	70	5	NA	
	JUMLAH	75	70	

KERTAS KERJA 3
SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR RINCI	NILAI RATA-RATA STANDAR KELOMPOK
STANDAR ATRIBUT		
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	85%	88%
Independensi dan Objektivitas	95%	
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	89%	
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	84%	
STANDAR PELAKSANAAN		
Mengelola Kegiatan Audit Intern	95%	75%
Sifat Dasar Pekerjaan	55%	
Perencanaan Penugasan	55%	
Pelaksanaan Penugasan	81%	
Komunikasi Hasil Penugasan	73%	
Pemantauan Tindak Lanjut	93%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		81,78%
KATEGORI SIMPULAN		5,00%

KRITERIA KATEGORI SIMPULAN	
Tingkat Kesesuaian dengan Standar	Kategori
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89%	Baik
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0 - 54%	Sangat Kurang